

**PENYELESAIAN KONFLIK TERITORIAL PERAIRAN TUAS
ANTARA MALAYSIA DAN SINGAPURA TAHUN 2018**

(Skripsi)

Oleh

Anya Nurafifa Rahmadany



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENYELESAIAN KONFLIK TERITORIAL PERAIRAN TUAS ANTARA MALAYSIA DAN SINGAPURA TAHUN 2018

Oleh

Anya Nurafifa Rahmadany

Konflik Tuas pada tahun 2018 antara Malaysia dan Singapura merupakan konflik teritorial akibat adanya jalan buntu (*deadlock*) antara kedua negara, serta adanya sikap agresifitas Malaysia dan Singapura dalam menentukan garis batas teritorial kedua negara. Konflik Tuas merupakan sengketa bilateral antara Malaysia dan Singapura setelah kedua negara ini menghadapi persoalan yang sama pada periode-periode sebelumnya. Konflik Tuas tahun 2018 telah membuat ketegangan antara Singapura dan Malaysia pada level kepemimpinan hingga instansi-instansi di bawahnya pada level setingkat menteri. Persoalan ini berdampak pada hubungan ekonomi, perniagaan perairan hingga terhentinya beberapa proyek investasi kerjasama pengembangan maritim yang sebelumnya telah direncanakan bersama. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya penyelesaian konflik teritorial perairan Tuas antara Malaysia dan Singapura tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori atau konsep yang digunakan adalah teori konflik, konflik teritorial dan penyelesaian konflik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian konflik Tuas tahun 2018 tidak lepas dari inisiatif Malaysia dan Singapura dalam mengurangi provokasi pada kedua negara yang dapat dilihat dari beberapa pernyataan pada tingkat pemimpin Malaysia dan Singapura. Kemudian wujud penyelesaian konflik Tuas tahun 2018 diwujudkan melalui negosiasi baik secara bilateral, menerima rekomendasi dan fasilitasi ASEAN, serta UNCLOS yang berdampak pada terbentuk solusi yang dapat diterima oleh Malaysia dan Singapura.

Kata Kunci: Konflik Tuas, Konflik Teritorial, Penyelesaian Konflik.

ABSTRACT**THE CONFLICT COMPLETION BETWEEN MALAYSIA AND
SINGAPORE ON TERRITORY CONFLICT OF TUAS 2018****By****Anya Nurafifa Rahmadany**

The conflict of Tuas territory in 2018 between Malaysia and Singapore due to the deadlock between the two countries, as well as the existence of the attitude of aggression Malaysia and Singapore in determining the territorial boundary line of the two countries. The conflict of Tuas 2018 is a bilateral dispute between Malaysia and Singapore after the two countries faced the same issue in previous periods. In 2018 the Tuas conflict created tension between Singapore and Malaysia on the level of leadership to agencies under it at the ministerial level. These issues have an impact on economic relations, strait commerce up to the suspension of several projects of investment of maritime development cooperation that previously had planned together. The purpose of this research is to know the territorial conflict completion efforts of the waters between Malaysia and Singapore in 2018. This research uses a qualitative descriptive method. Theories or concepts used are conflict theory, territorial conflict and conflict completion. The results of this research is that conflict resolution of Tuas 2018 between Malaysia and Singapore initiatives in reducing provocations on both countries. Then a form of conflict resolution of Tuas in 2018 realized through negotiations bilaterally, accepted the recommendation and facilitation of ASEAN, as well as UNCLOS that impact formed an acceptable solution by Malaysia and Singapore.

Keywords : Tuas Conflict, Territorial Conflict, Conflict Completion.

**PENYELESAIAN KONFLIK TERITORIAL PERAIRAN TUAS
ANTARA MALAYSIA DAN SINGAPURA TAHUN 2018**

Oleh

Anya Nurafifa Rahmadany

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hubungan Internasional**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul : **PENYELESAIAN KONFLIK TERITORIAL
PERAIRAN TUAS ANTARA MALAYSIA
DAN SINGAPURA TAHUN 2018**

Nama Mahasiswa : **Anya Nurafifa Rahmadany**

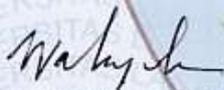
No. Pokok Mahasiswa : 1516071016

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

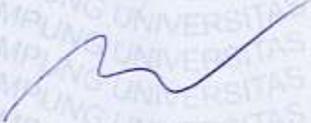


1. Komisi Pembimbing


Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.
NIP 19780328 200812 2 002


Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.
NIP 231602880717201

2. Ketua Jurusan
Hubungan Internasional

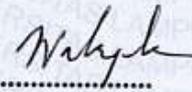

Dr. Ari Darmastuti
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si.**



Sekretaris

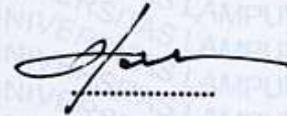
: **Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Hasbi Sidik, S.IP, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **8 November 2019**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 November 2019
Yang membuat pernyataan,



Anya Nurafifa Rahmadany
NPM 16071016

Catatan

Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah abstrak.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Anya Nurafifa Rahmadany. Lahir di Palembang pada tanggal 27 Januari 1998, sebagai putri kedua dari tiga bersaudara, yakni Amelia Dyharanisha dan Muhammad Rafly Ramadhan dari pasangan Bapak Anas Azadin dan Ibu Nurhayati. Pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Taman

Kanak-Kanak YWKA Kota Palembang pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri 157 Palembang periode 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palembang periode 2009-2012, Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Palembang periode 2012-2015. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Strata-1 di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung pada pertengahan 2015, dengan konsentrasi studi kawasan.

Penulis juga merupakan mahasiswa aktif dalam berorganisasi di lingkup kampus maupun di luar kampus, seperti HMJ HI Unila pada divisi *Sport and Recreations* pada tahun 2015, dan partisipasi dalam program AIESEC sebagai mahasiswa pertukaran pelajar di *Sun Yat Sen University* Guangzhou, Cina tahun 2017. Selain itu, penulis juga berkesempatan mengikuti *Internship* program dari *Yu-Foundation* di Guangzhou, Cina tahun 2017. Pada pertengahan tahun 2017, penulis berpartisipasi di Indonesia pada *Swarnadwipa culture project* AIESEC Palembang di Universitas Sriwijaya. Lalu penulis juga mengikuti keikutsertaan

sebagai Panitia pada Pertemuan Sela Nasional Hubungan Internasional Se-Indonesia (PSNMHII) ke-30 di tahun 2018. Penulis juga berkesempatan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur , Malaysia tahun 2018.

PERSEMBAHAN

*Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena-Nya penulis
dapat menyelesaikan skripsi dengan baik hingga saat ini.*

Kepada kedua orangtuaku, yang telah memberikan dukungannya,

Kepada kakak-adikku yang selalu memberikan semangat,

Kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi,

Kepada dosen-dosenku yang telah membagi ilmunya,

Seluruh teman-teman HI Unila

Serta bagi diriku yang dapat menyelesaikannya hingga akhir

SANWACANA



Alhamdulillahillobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena rahmat, kasih dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KONFLIK TERITORIAL PERAIRAN TUAS ANTARA MALAYSIA DAN SINGAPURA TAHUN 2018”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kelancaran, dan kekuatan yang telah Engkau berikan dalam melancarkan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syarif Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., Ketua Jurusan Hubungan Intrnasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

4. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk memberikan waktu serta tenaganya dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hasbi Sidik, S.IP, M.A selaku Dosen Penguji skripsi penulis dalam setiap bimbingan, saran, maupun kritik yang membangun bagi kelancaran skripsi penulis.
6. Ibu Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk segala kesabaran, tenaga dan waktu dalam kelancaran penulisan skripsi.
7. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan seluruh ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh staf dan karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya dalam jurusan Hubungan Internasional.
9. Kepada kedua orangtua penulis yang selalu memberikan dukungannya, baik dalam segi moril hingga materil hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kakak dan adik penulis, Amel dan Rafly yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
11. Kepada seluruh angkatan Hubungan Internasional yang selalu memberi warna dalam hidupku.

12. Kepada seluruh teman-teman KKN Unila periode II Tahun 2018,
kenangan dan pengalaman yang sangat berkesan selama di Desa.
13. Kepada seluruh teman-teman *around the world*, terima kasih.

Bandar Lampung, 8 November 2019
Dengan penuh rasa terimakasih,

Anya Nurafifa Rahmadany
1516071016

MOTTO

*As we go on we remember
All the times we spent together
As our lives change from whatever
We will still be friends forever*

-Anya Nurafifa Rahmadany-

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Tujuan Penelitian	6
	1.4 Manfaat Penelitian	6
II.	TINJAUAN PUSTAKA	7
	2.1 Penelitian Terdahulu	7
	2.2 Landasan Teori	13
	2.2.1 Teori Konflik	13
	2.2.1.1 Konflik Teritorial	14
	2.2.1.2 Penyelesaian Konflik	16
	2.3 Kerangka Pemikiran	18
III.	METODE PENELITIAN	21
	3.1 Tipe Penelitian	21
	3.2 Fokus Penelitian	22
	3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	22
	3.4 Teknik Analisis Data	23
IV.	GAMBARAN UMUM	25
	4.1 Perkembangan Konflik Teritorial di Asia Tenggara	25
	4.1.1 Sengketa Teritorial (Indonesia dan Malaysia)	29
	4.1.2 Sengketa Paracel (Tiongkok dan Vietnam)	31
	4.1.3 Sengketa Sullu (Filipina dan Malaysia)	32

4.2 Sejarah dan Perkembangan Konflik Teritorial Singapura dan Malaysia	34
4.2.1 Konflik Darat	37
4.2.2 Konflik Perairan	39
4.3 Konflik Tuas Tahun 2018	42
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
5.1 Upaya Negosiasi antara Malaysia dan Singapura dalam menyelesaikan Konflik Tuas.....	45
5.1.1 Negosiasi dalam Bilateral	46
5.1.2 Negosiasi melalui Fasilitasi dan Rekomendasi ASEAN	50
5.1.3 Negosiasi melalui Penyelarasan dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS)	52
5.2 Dampak Konflik Teritorial Perairan Tuas	57
VI. PENUTUP.....	62
6.1 Kesimpulan	62
6.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyelesaian Konflik Antara Malaysia dan Singapura.....	3
Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1 Sejarah Konflik Darat dan Perairan Antara Singapura dan Malaysia.	35
Tabel 5.2 Pengaruh Konflik Tuas Tahun 2018 Terhadap Konstelasi Bilateral dan Regional	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Perairan Tuas	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 5.1 Skema Penentuan Garis Batas Teritorial UNCLOS	55

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
ZEE	: <i>Zone Economy Eksklusive</i>
ASC	: <i>ASEAN Security Community</i>
MoU	: <i>memorandum of understanding</i>
3 G	: <i>Glory, Gospel, Gold</i>
ILS	: <i>Instrument Landing System</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
NST	: <i>New Strait Time</i>
TPN	: <i>Third Person Note</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan konstelasi regional Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari konflik, diantaranya adalah konflik perbatasan. Sejak dekade 1970-an hingga tahun 2018 terdapat beberapa negara Asia Tenggara yang menghadapi konflik perbatasan, diantaranya Filipina dan Malaysia, Indonesia dan Malaysia, Malaysia dan Singapura serta kasus-kasus lainnya. Diantara konflik-konflik tersebut terdapat bentuk konflik perbatasan yang terjadi secara berulang yang melibatkan Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini menghadapi berbagai insiden atas konflik perbatasan yaitu tahun 1970-1971, 1979-1980, 1983, 1990 dan tahun 2018.¹

Singapura merupakan negara yang secara geografis menjadi yang terkecil di wilayah Asia Tenggara. Luas wilayah negara ini hanya 721,4 km. Luas wilayah negara ini diperkirakan meningkat karena program reklamasi yang secara intensif dijalankan.² Di lain pihak, Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Singapura. Negara ini terbagi atas Malaysia Barat dan Malaysia Timur

¹ Rusdi Omar, "An Analysis Underlying Factor That Affected Malaysia-Singapore Relations During The Mahathir Era : Discord and Continuity", *Philosophy Doctoreal Programe Journal*, University of Adelaide, Adelaide, 2014, hal.38-39.

² "Singapore : Fact, History and Geography", <https://www.britannica.com/place/Singapore>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16:30.

(Serawak) dengan total wilayah seluas 330.603 km.³ Malaysia dan Singapura kembali menghadapi sengketa batas perairan ketika pihak Malaysia menyatakan sikap keras bahwa Singapura telah mengembangkan kebijakan reklamasi secara besar-besaran yang berakibat luas wilayah daratan (*coastal area*) dari Singapura terus meluas hingga 600 sampai 750 meter dari garis pantai.⁴ Termasuk wilayah Jurong yang memiliki luas wilayah hingga 32 km sehingga akan mempengaruhi batas perairan kedua negara, yaitu wilayah Perairan Tuas. Wilayah Perairan Tuas merupakan gugusan pesisir dan perairan sekitar Barat Singapura atau sebelah Utara Selat Jurong.⁵ Gambaran mengenai wilayah Tuas yang menjadi obyek sengketa antara Malaysia dan Singapura dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Wilayah Perairan Tuas



Sumber : “Malaysia and Singapore Conflict on Territorial Waters”, <https://safety4sea.com/malaysia-and-singapore-conflict-on-territorial-waters/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

³ “Singapore, Malaysian Maritime Disputes”, <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-malaysia-maritime-dispute-port-limits-timeline-11006762>, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16:30

⁴ “Maritime Disputes : Timeline of Action Between Singapore and Malaysia From 1979”, <https://www.todayonline.com/singapore/maritime-dispute-timeline-actions-between-singapore-and-malaysia-1979>, diakses pada tanggal 2 April 2019 pukul 16:30.

⁵ “Hubungan Singapura-Malaysia Memanas Akibat Batas Pelabuhan”, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4333709/hubungan-malaysia-dan-singapura-memanas-akibat-batas-pelabuhan>, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16:30.

Peristiwa konflik teritorial yang terjadi antara Malaysia dan Singapura sejak 1970 sampai 2018 terlihat pada tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Penyelesaian Konflik Antara Malaysia dan Singapura

No	Periode	Rentan Penyelesaian Konflik	Keterangan
1.	1970-1971	9 Bulan	Tercapainya pengelolaan bersama wilayah perbatasan tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Singapura) di sekitar Selat Malaka. ⁶⁷
2.	1979-1980	3 Bulan	De-eskalasi konflik yang ditandai dengan menurunnya ketegangan antara Malaysia dan Singapura. ⁸
3.	1983	1 Bulan	De-eskalasi konflik yang ditandai dengan menurunnya ketegangan antara Malaysia dan Singapura. ⁹
4.	1990	1 Bulan	Diterimanya rekomendasi ICJ (International Court Justice) ¹⁰
5.	2018	4 Bulan	Diakhiri melalui pengelolaan bersama melalui pertemuan tingkat menteri. ¹¹

Sumber: Data dikelola oleh penulis/peneliti

⁶ *Ibid.*

⁷ Jean Nicole, "Managing Territorial Disputes in Southeast Asian : Is There More Than South China Sea Conflict", The Journal of Current of Southeast Asian Affairs, Institute of Global Area Studies Publishing, Hamburg, 2017, hal.46.

⁸ "Singapore Relations With Malaysia, http://factsanddetails.com/southeast-asia/Singapore/sub5_7c/entry-3769.html, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16:30

⁹ "Singapore Relations With Malaysia, http://factsanddetails.com/southeast-asia/Singapore/sub5_7c/entry-3769.html, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16:30

¹⁰ "Case Between Malaysia-Singapore Disputes", https://opil.ouplaw.com/browse;jsessionid=0ED11748A24135D177B435EB651BAC91?page=3&pageSize=10&sb_0=ae60e488-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sb_1=ae60ef3c-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sb_2=ae5ddc85-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sort=title, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16:30

¹¹ "Sengketa Maritim Singapura-Malaysia : Ini Tanggapan PM Mahathir", <http://batam.tribunnews.com/2018/12/08/sengketa-maritim-singapore-malaysia-ini-tanggapan-pm-mahathir-mohamad>, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16:30

Tabel 1.1 di atas maka dapat dipahami bahwa konflik perbatasan wilayah perairan antara Malaysia dan Singapura bukan merupakan hal yang baru. Kedua negara ini seringkali menghadapi konflik sejak tahun 1970. Meskipun konflik terjadi secara berulang, namun Malaysia dan Singapura berhasil membangun penyelesaian konflik dalam kurun waktu yang singkat, yaitu kurang dari satu tahun. Ini menegaskan bahwa sebenarnya kedua negara telah memiliki instrumen penyelesaian konflik, baik secara bilateral ataupun melalui fasilitasi dari pihak lain sehingga permasalahan tidak berkembang menjadi pelik dan berkepanjangan.

Tahun 2018, konflik teritorial wilayah perairan kembali muncul diantaranya konflik Tuas antara Malaysia dan Singapura. Singapura dan negara tetangganya di utara Malaysia terlibat dalam sengketa maritim setelah Malaysia memperpanjang batas pelabuhan Johor Bahru dengan cara yang menurut pemerintah Singapura merambah ke perairan teritorial Singapura di lepas pantai Tuas. Kasus ini terjadi akibat 14 gangguan oleh kapal pemerintah Malaysia yang menerobos masuk ke dalam wilayah Singapura, yang digambarkan sebagai tindakan agresif oleh Menteri Transportasi Singapura Khaw Boon Wan.¹²

Implementasi kebijakan reklamasi yang dijalankan Singapura ternyata membawa berbagai dampak sosial, politik dan ekonomi termasuk hubungannya dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Dengan semakin bertambahnya wilayah Singapura maka ini akan berdampak pada batas perairan. Inilah yang memicu terjadinya sengketa Tuas diantara kedua negara. Dari konflik tahun 1970-1971

¹²“Singapore : Malaysian Maritime Disputes 2 Vessels Malaysian Still in singapore Waters”, <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/2-malaysia-vessels-still-in-singapore-waters-maritime-dispute-11108242>, diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 16:30.

hingga konflik tahun 2018 ternyata berhasil diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat.¹³

Konflik teritorial perairan Tuas menjadi fenomena menarik karena persoalan ini muncul ketika Malaysia dan Singapura dihadapkan pada agenda perdamaian dan pembangunan regional. Selain itu, konflik ini muncul akibat akumulasi persoalan-persoalan lama, sehingga seperti halnya konflik di tahun-tahun sebelumnya, konflik Tuas juga dapat berakhir dalam kurun waktu yang cukup singkat. Inilah yang menjadi diskursus studi politik regional yang menarik untuk dibahas lebih lanjut tentang bagaimana Malaysia dan Singapura menyelesaikan konflik dan mengapa konflik ini dapat terselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat.

1.2. Rumusan Masalah

Hubungan Malaysia dan Singapura memang berjalan secara fluktuatif. Terkadang dapat berjalan dengan kondusif, namun terkadang diwarnai dengan friksi atau ketegangan, namun demikian perang secara terbuka belum pernah terjadi antara Malaysia dan Singapura.

Terjadinya konflik Tuas tahun 2018 diakibatkan oleh kegagalan Malaysia dan Singapura dalam penentuan garis batas kedua negara dan kemudian mendorong pemimpin masing-masing Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad. Pada akhirnya pertemuan dan pembicaraan kedua pemimpin tersebut dapat menjadi tonggak

¹³ *Ibid.*

sejarah (*mile stone*) bagi terciptanya penyelesaian konflik pasca insiden Tuas. Melalui uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan, yaitu : “Bagaimana penyelesaian konflik teritorial perairan Tuas antara Malaysia dan Singapura tahun 2018?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penyelesaian konflik teritorial perairan Tuas antara Malaysia dan Singapura tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Pada aspek Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memahami akar persoalan perkembangan konflik dan penyelesaian konflik antara Malaysia dan Singapura khususnya Konflik Tuas tahun 2018 dengan menggunakan konflik teritorial dan penyelesaian konflik. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman teori-teori konflik pada kajian Hubungan Internasional.
- b. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi penyelesaian konflik-konflik perbatasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang konflik teritorial memang telah menjadi kajian penting bagi studi ilmu hubungan internasional. Ini disebabkan konflik teritorial masuk dalam isu *high politic* yang cukup penting dalam dinamika hubungan negara-bangsa karena mampu menunjukkan dinamika politik dan kebijakan-kebijakan luar negeri pada kawasan tertentu. Salah satu wilayah yang cukup sering atas konflik teritorial adalah Asia Tenggara. Meskipun hubungan negara-negara di wilayah ini secara umum dapat berjalan harmonis, namun beberapa konflik telah terjadi dan menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan.

Beberapa penelitian/kajian tentang konflik teritorial di kawasan Asia Tenggara adalah :

1. Hassan Wirayudha yang berjudul “Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Dalam Penyelesaian Konflik Sipadan dan Ligitan”.¹⁴ Dalam tulisannya Hassan Wirayudha menyatakan bahwa konflik Sipadan dan Ligitan muncul bersamaan dengan sikap agresifitas Malaysia dalam mengembangkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara.

¹⁴ Hassan Wirayudha, “Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Dalam Penyelesaian Konflik Sipadan dan Ligitan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 33, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Pada akhirnya masalah ini berhasil dimenangkan oleh pihak Malaysia karena keberhasilannya dalam memanfaatkan Hukum Internasional dari Mahkamah Internasional.

2. A. Arifah, yang berjudul “Kepentingan China Dalam Pengklaiman Kepulauan Spratly dan Paracel Terhadap Konflik Laut China Selatan”.¹⁵ Dalam tulisannya Arifah menyatakan bahwa kepentingan China dalam pengklaiman Spratly dan Paracel merupakan ambisi China dalam memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara. Hal ini penting karena wilayah ini diperebutkan pengaruhnya oleh negara-negara dunia, diantaranya Jepang hingga Amerika Serikat. Pertimbangan ini meliputi kepentingan politik (hegemoni) hingga perekonomian, khususnya pengembangan eksplorasi minyak dan gas.
3. B. Syaiful yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Batu Puteh Antara Malaysia dan Singapura Tahun 2008”.¹⁶ Dalam tulisannya Syaiful menyatakan bahwa sengketa Singapura dan Malaysia terjadi akibat faktor geografis yang cukup rapat, dimana perbatasan kedua negara memiliki wilayah perairan yang cukup sempit. Kemudian konflik Batu Puteh juga terjadi akibat kegagalan kedua negara dalam menyelesaikan persoalan dalam kerangka *win-win solution*, sekaligus akibat

¹⁵ Skripsi, A. Arifah, “Kepentingan China Dalam Pengklaiman Kepulauan Spratly dan Paracel Terhadap Konflik Laut China Selatan”, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Bandung, 2018.

¹⁶ Skripsi, B. Syaiful, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Batu Puteh Antara Malaysia dan Singapura Tahun 2008”, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Padang, 2011.

ketidakjelasan peta perairan yang ditinggalkan oleh pihak kolonialis Inggris pada masa pendudukan.

4. Daniel W Boon Chua yang berjudul “*Why It Still Matters of Singapore*”.¹⁷ Dalam tulisannya Chua menyatakan bahwa sengketa wilayah perbatasan antara Singapura dan Malaysia telah ada sejak 1965. Bahkan pasca masa ini beberapa pemimpin negara-negara Asia Tenggara, diantaranya Tunku Abdul Rahman, Soekarno, dan beberapa tokoh lainnya untuk membicarakan persoalan ini tanpa harus difasilitasi oleh negara-negara Barat. Setelah beberapa dekade berlalu, ternyata Malaysia semakin agresif dalam memperjuangkan pengaruhnya, termasuk dengan mengklaim wilayah perbatasan sehingga terjadi sengketa dengan Singapura.
5. M Okano yang berjudul “*How To Deal With Border Issue : A Diplomat Practioner Perspective*”.¹⁸ Dalam tulisannya Okano menyatakan bahwa sengketa perbatasan perairan internasional dapat terjadi ketika negara cenderung agresif terhadap pihak lain, sedangkan instrumen hukum internasional belum sempurna untuk mengatur pada kasus-kasus spesifik diantara negara-negara yang memiliki wilayah perbatasan yang relatif sempit. Bagaimanapun juga rezim maritim internasional perlu memandang penyelesaian konflik secara objektif dengan mengikutsertakan para ahli yang dianggap netral untuk memperoleh solusi yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa.

¹⁷ Daniel W Boon Chua, “Why It Still Matters of Singapore”, RSIS Commentary Journal, S Rajaratnam International School Studies, No.054.Singapore, 2015.

¹⁸ M Okano, “How To Deal With Border Issue : A Diplomat Practioner Perspective” Journal of Eurasia Border Review, Hokudai Institute, Tokyo, 2015.

Beberapa *literature review* (tinjauan pustaka) di atas, juga terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di dalam skripsi ini, tetapi tentu terdapat beberapa perbedaan. Gambaran mengenai komparasi beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Komparasi Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tujuan Penelitian	Teori dan Konsep	Hasil
1.	Hassan Wirayudha	Mengetahui fenomena Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Dalam Penyelesaian Konflik Sipadan dan Ligitan	Teori Penyelesaian Konflik Konsep Negara	Konflik Sipadan dan Ligitan muncul bersamaan dengan sikap agresifitas Malaysia dalam mengembangkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara. Pada akhirnya masalah ini berhasil dimenangkan oleh pihak Malaysia karena keberhasilannya dalam memanfaatkan hukum internasional dari Mahkamah Internasional.
2.	A. Arifah	Mengetahui kepentingan Cina dalam klaim wilayah Spratly atas sengketa wilayah perairan dengan Filipina.	Konsep Hukum Internasional.	Kepentingan Cina dalam pengklaiman Spratly dan Paracel merupakan ambisi Cina dalam memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara. Hal ini penting karena wilayah ini diperebutkan pengaruhnya oleh negara-negara dunia, diantaranya Jepang hingga Amerika Serikat. Pertimbangan ini meliputi kepentingan politik (hegemoni) hingga perekonomian, khususnya pengembangan eksplorasi minyak dan gas.

3.	B. Syaiful	Mengetahui tinjauan Yuridis terhadap penyelesaian Sengketa Batu Puteh antara Malaysia dan Singapura Tahun 2008	Konsep <i>capital market</i> .	Sengketa Singapura dan Malaysia terjadi akibat faktor geografis yang cukup rapat, dimana perbatasan kedua negara memiliki wilayah perairan yang cukup sempit. Kemudian konflik Batu Puteh juga terjadi akibat kegagalan kedua negara dalam menyelesaikan persoalan dalam kerangka win-win solution, sekaligus akibat ketidakjelasan peta perairan yang ditinggalkan oleh pihak kolonialis Inggris pada masa pendudukan.
4.	Daniel W Boon Chua	Mengetahui sikap konsistensi Singapura sehingga tidak bersedia untuk mengakhiri konflik dan terus memperjuangkan wilayah perbatasan perairan dengan Malaysia.	Teori konflik dan Rekonsiliasi Konflik.	Sengketa wilayah perbatasan antara Singapura dan Malaysia telah ada sejak 1965. Bahkan pada masa ini beberapa pemimpin negarane-negara Asia Tenggara, diantaranya Tunku Abdul Rahman, Soekarno, dan beberapa tokoh lainnya untuk membicarakan persoalan ini tanpa harus difasilitasi oleh negarane-negara Barat. Setelah beberapa dekade berlalu, ternyata Malaysia semakin agresif dalam memperjuangkan pengaruhnya, termasuk dengan mengklaim wilayah perbatasan sehingga terjadi sengketa dengan Singapura.

5.	M Okano	Mengetahui potensi penyelesaian atas konflik wilayah perairan antara Singapura dan Malaysia secara objektif.	Teori Hukum Internasional dan Rekonsiliasi Konflik.	Sengketa perbatasan perairan internasional dapat terjadi ketika negara cenderung agresif terhadap pihak lain, sedangkan instrumen hukum internasional belum sempurna untuk mengatur pada kasus-kasus spesifik diantara negara-negara yang memiliki wilayah perbatasan yang relatif sempit. Bagaimanapun juga rezim maritim internasional perlu memandang penyelesaian konflik secara objektif dengan mengikutsertakan para ahli yang dianggap netral untuk memperoleh solusi yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa.
----	---------	--	---	---

Sumber: Dikelola oleh penulis/peneliti.

Penelitian yang akan dilakukan lewat skripsi ini akan lebih spesifik, yaitu membahas mengenai konflik teritorial di wilayah perairan antara Malaysia dan Singapura masih terjadi di Tahun 2018. Melalui paparan penelitian dari lima penulis/peneliti terdapat beberapa perbedaan yaitu adanya persoalan yang lebih rumit pada konflik perairan antara Malaysia dan Singapura, meliputi keterbatasan peran ASEAN, adanya korelasi dengan faktor sejarah, serta masalah-masalah lainnya yang tidak secara mendalam diulas oleh kelima penulis/peneliti di atas. Kemudian peneliti bertujuan untuk mengetahui penyelesaian konflik teritorial perairan Tuas antara Malaysia dan Singapura tahun 2018.

Penulis dapat mengambil manfaat bahwa penelitian-penelitian di atas dapat melengkapi kajian ini, sekaligus memberikan arah dan gambaran bagi penulis bahwa persoalan konflik teritorial antara Malaysia dan Singapura bukan hanya menjadi persoalan yang sederhana, namun berhubungan faktor historis, adanya pengaruh dari norma-norma atau aturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya efektif dan lengkap karena merupakan peninggalan pihak kolonialis pada masa lalu, hingga adanya benturan kebijakan pembangunan wilayah dengan kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*) kedua negara.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Konflik

Konflik sendiri dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik kekinian akibat resistensi masyarakat yang terbatas. Berbagai perubahan yang terjadi mendorong individu dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengadakan tindakan-tindakan kompromistik, sebagian dapat menghasilkan solusi bersama, namun sebagian lainnya berujung terciptanya benturan-benturan antara individu, *stakeholder* ataupun organisasi. Brown Stewart menyatakan bahwa :

*“...the occurrence of conflict caused some major cause effort a person or a group of people to realize that goal will be achieved, mastering the allocated resources will be shared by the party that has power legally, decisions taken or the characters or the behaviour of the parties involved.”*¹⁹ (terjadinya konflik diakibatkan beberapa penyebab utama yaitu upaya seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai, menguasai alokasi sumber daya yang akan dibagikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan secara sah, keputusan yang diambil ataupun karakter atau perilaku pihak-pihak yang terlibat).

¹⁹ Raymond C. Kelly, *Warless Societies and the Origins of War*, Ann Arbor : University of Michigan, Press, 2000, hal.19.

Definisi Stewart ini menekankan bahwa konflik tidak terjadi secara reaksioner ataupun eforia (terjadi tanpa adanya latar belakang ataupun alasan yang jelas). Lebih dari itu konflik terjadi setelah pihak-pihak yang terlibat menjalani berbagai pembelajaran yang sebelumnya dipicu oleh sebuah momentum atau peristiwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di dalamnya.

Lebih lanjut Stewart menyatakan proposisinya bahwa konflik merupakan bagian dari perkembangan peradaban manusia. Konflik dipandang sebagai permasalahan yang akan berkembang semakin rumit ketika menyangkut eksistensi dan kelangsungan kehidupan sebuah bangsa. Berbagai instrumen pada sebuah negara modern akan membentuk sebuah gerakan arus bawah sampai dengan terwujudnya sebuah kebijakan luar negeri yang terkadang bersifat *coercion* terhadap negara lain dan persoalan akan muncul ketika kebijakan luar negeri ini dilegitimasi oleh seluruh entitas pada suatu negara tersebut. Konflik terjadi juga akibat adanya pengaruh dari luar. Fenomena ini terjadi ketika negara-negara mengambil kepentingan atas konflik, diantaranya mewujudkan kepentingan ekonomi hingga penjualan persenjataan militer.

2.2.1.1 Konflik Teritorial

Konflik teritorial merupakan salah satu bentuk konflik bilateral antar negara. Menurut definisi yang dikeluarkan *IISS Military Balance* (Institut Internasional untuk Studi Strategis), konflik teritorial adalah konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih dalam memperebutkan kontrol atas suatu wilayah.

Selengkapnya *IISS Military Balance* (Institut Internasional untuk Studi Strategis)

menyatakan bahwa :

“...dalam konflik teritorial negara-negara yang terlibat saling berebut memperoleh legitimasi dan kontrol atas wilayah perairan. Meskipun demikian wilayah perairan memang menjadi habitat sekunder bagi manusia yang lebih sulit dibuktikan dibandingkan wilayah darat. Terdapat area abu-abu (blur region) yang disebabkan sempitnya wilayah perairan, dominasi militer salah satu pihak terhadap pihak lain, adanya potensi sumber daya laut dan lain-lainnya. Ini membantuk potensi konflik teritorial yang akan mudah memicu insiden-insiden di tapal batas perairan.”²⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa konflik teritorial di wilayah perairan terjadi karena wilayah perairan memang menjadi wilayah yang rentan untuk diperebutkan, terlebih lagi jika perairan tersebut merupakan area yang sempit dan menjadi urat nadi pelayaran internasional. Kemudian konflik teritorial terjadi akibat sikap agresif dan provokasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Meskipun dampak konflik teritorial tidak seperti konflik darat yang bisa terjadi gesekan secara langsung, namun konflik ini tetap berbahaya karena dapat mengganggu stabilitas regional berkaitan dengan terganggunya jalur perairan internasional dan pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya, serta terjadinya insiden benturan kekuatan laut pada negara yang bersangkutan.

Konflik teritorial merupakan persoalan yang mendominasi konflik-konflik dunia pasca Perang Dingin. Tidak adanya persetujuan ideologi membuat gesekan-gesekan antar negara di dominasi pada kasus perebutan pengaruh dan kontrol atas wilayah perairan. Ini tidak lepas karena wilayah perairan sangat menentukan

²⁰ Julius Advise Adinoyi, "Territoriality and Territorial Proximity As The Causes International Conflict", *The Journal of International Affairs and Global Strategy*, Vol.36, Routledge Publishing, London and New York, 2016, hal.47-48.

kemajuan dan kelangsungan perekonomian nasional, meliputi sebagai lalu lintas ekspor, sebagai urat nadi pelayaran internasional hingga adanya potensi sumber daya alam, berupa gas, minyak bumi dan lain-lainnya sehingga wilayah ini menjadi layak untuk diperebutkan.

2.2.1.2. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik merupakan wujud keputusan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengakhiri rangkaian konflik yang terjadi, baik melalui paksaan ataupun melalui sikap sukarela.

Penyelesaian konflik teritorial diperlukan berbagai upaya dalam penyelesaian konflik. Salah satunya melalui negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah proses, yang mana kedua belah pihak belum bertemu secara langsung. Hal ini berarti, negosiasi dapat dilakukan melalui teknologi-teknologi yang ada.²¹

Secara estimologi negosiasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

“...The process where interested parties resolve dispute, agree upon courses of action, bargain for individual or collective advantage, and/or attempt to craft outcomes which serve their mutual interests (proses perundingan dua pihak yang bertikai baik sifatnya individual maupun kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan)”.²²

Negosiasi dijalankan dengan memperhatikan beberapa unsur meliputi pertama, kepentingan yang berarti kebutuhan keinginan dan motivasi dari suatu negara, kedua, legitimasi terkait dengan pengesahan sebuah solusi, ketiga,

²¹ Chas W. Freeman, *The Diplomat Dictionary*, Washington DC : United States of Institute of Peace Press, 1994, hal.71.

²² Brian Frinch dan kusnandar (ed), *30 Minutes Negotiate : Deal Memenangkan Negosiasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.11.

hubungan antar negara meliputi aspek sejarah dan pengalaman-pengalaman masa lalu, keempat, adanya alternatif, kelima, adanya opsi atau pilihan, keenam, komitmen dan ketujuh adalah faktor komunikasi. Dengan demikian sukses atau tidaknya negosiasi adalah jika pihak-pihak yang terlibat konflik memenuhi unsur-unsur tersebut dari upaya untuk mewujudkan kepentingan hingga adanya komunikasi yang berkelanjutan.²³

Negosiasi dijalankan sangat fleksibel. Tempat negosiasi tidak selalu dijalankan diluar negara yang terlibat konflik yang terpenting adalah hadirnya para negosiator yang mewakili negara untuk memperoleh *vis a vis achievment* ataupun juga *win-win solutions*. Dalam negosiasi pencapaian solusi umumnya melalui beberapa tahapan ataupun dapat juga hasil kesepakatan setelah salah satu pihak memberikan kompensasi tertentu.

Penyelesaian sengketa teritorial juga dapat tercapai melalui pengaruh dari *regional constellation influencer* (konstelasi politik regional). Artinya pada setiap wilayah dengan iklim yang kondusif akan dapat dengan mudah membangun penyelesaian konflik, namun kondisi yang bertolak belakang akan terjadi ketika sebuah wilayah memang cukup rentan terjadinya konflik. Kondisi ini akan memunculkan tentang apa yang disebut dengan *spiral of violence*.²⁴

²³ *Ibid*,

²⁴ Julius Adavise Adinoyi, *op.cit*.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran ini, peneliti akan menjelaskan bahwa konflik antar negara merupakan diskursus politik-keamanan yang telah melalui rangkaian sejarah panjang. Konflik muncul akibat sikap agresif satu negara terhadap negara lain yang didasarkan pada pengaruh kepemimpinan, dominasi militer satu negara terhadap negara lain, serta adanya upaya untuk menguasai sumber daya ekonomi. Ketika negara memiliki perbedaan kapasitas politik, ekonomi ataupun militer maka akan terjadi pendudukan, namun ketika kekuatan antara pihak yang bertikai sama maka akan terjadi konfrontasi atau persetujuan sebagai bentuk *coercion* (paksaan). Proposisi ini juga relevan dengan kasus konflik Tuas tahun 2018.

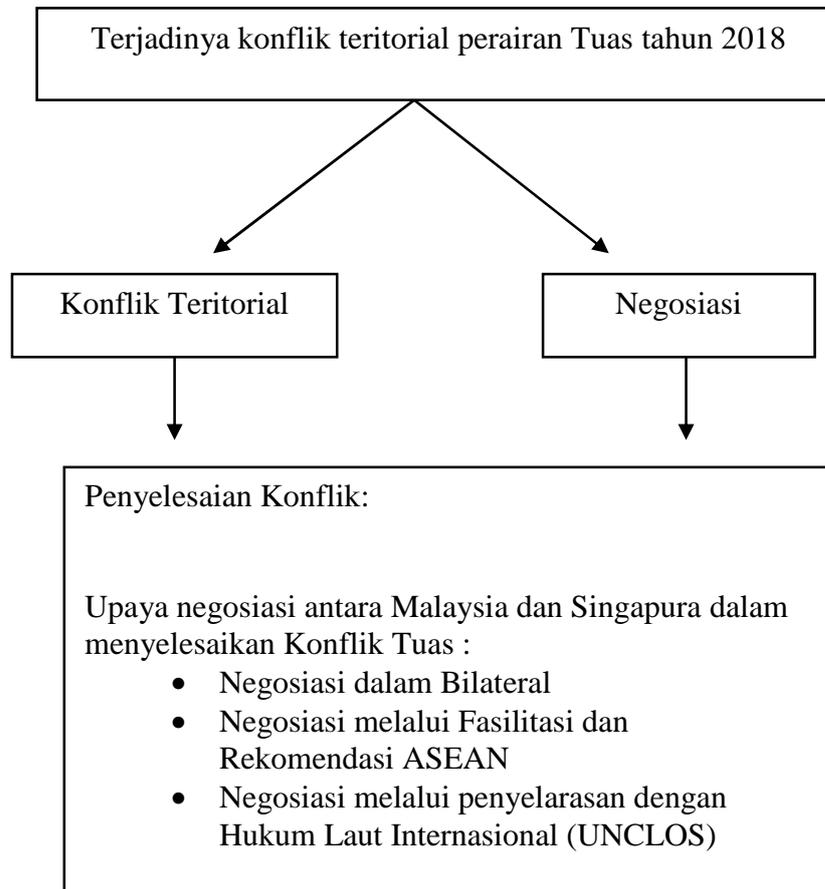
Salah satu jenis konflik antar negara adalah konflik teritorial, yaitu konflik yang memiliki keterkaitan dengan kedaulatan wilayah nasional, baik darat, perairan ataupun udara. Fenomena konflik teritorial perairan dimana masalah ini muncul akibat sikap agresif satu negara terhadap negara lain dengan secara sengaja memprioritaskan pencapaian kepentingan nasionalnya tanpa memperhatikan norma-norma internasional tentang hukum laut. Jika dikaitkan dengan konflik teritorial perairan antara Malaysia dan Singapura, maka persoalan ini muncul akibat sikap agresifitas negara ini yang berupaya mengedepankan pencapaian kepentingan nasional yaitu kedaulatan wilayah (*nation soverginty*) dengan mengabaikan negara lainnya.

Singapura sejak tahun 1979 telah mengembangkan kebijakan revitalisasi dan reklamasi sekitar wilayah perairan Tuas. Di lain pihak Malaysia juga semakin agresif dalam mengembangkan imperium Melayu Raya dengan memperluas

pengaruhnya, sehingga sengketa perbatasan yang melibatkan Malaysia tidak hanya dengan Singapura, namun juga dengan negara lain yaitu Indonesia, Brunei Darusallam dan Filipina. Dengan demikian konflik Tuas tahun 2018 bukanlah merupakan persoalan reaktif yang tiba-tiba muncul, namun merupakan akumulasi dari konflik-konflik serupa antara Malaysia dan Singapura yang selama ini belum dapat terselesaikan secara permanen.

Penyelesaian konflik Tuas, maka konflik Tuas tidak akan hilang dengan sendirinya tanpa adanya kebijakan fundamental antara Malaysia dan Singapura. Selain itu, konflik ini juga memerlukan dukungan dari pihak luar yaitu ASEAN sebagai organisasi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara. Upaya atau strategi penyelesaian konflik ini kemudian berhasil menjadi pendekatan yang dapat diterima oleh Malaysia dan Singapura yang ditunjukkan dengan persamaan visi dari dua kepemimpinan dan adanya upaya untuk menahan diri dari aparaturnya untuk menahan diri sehingga konflik yang lebih besar dapat dihindarkan.

Demikian kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sendiri lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya penelitian kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode dimana datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan.²⁵

Alasan digunakannya metode kualitatif deskriptif dianggap tepat karena dapat mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini, dan juga didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintrepertasikan kondisi-kondisi saat ini yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memaparkan sekaligus menganalisis tentang penyelesaian konflik teritorial perairan Tuas antara Malaysia dan Singapura tahun 2018.

²⁵ Saefudin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 40.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penentuan atas batasan-batasan dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk menghindari permasalahan diluar obyek yang diteliti. Selain itu, fokus penelitian juga dimaksudkan untuk menentukan garis pengamatan sehingga dapat tercapai analisa yang lebih terarah. Penetapan fokus juga berfungsi untuk mengumpulkan data-data dan informasi penting terkait penelitian yang sedang dijalankan sehingga mempermudah peneliti melakukan observasi. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan berbagai langkah penyelesaian konflik berupa negosiasi antara Malaysia dan Singapura dengan mengumpulkan berbagai data, laporan dan kajian dari Malaysia dan Singapura.

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Penulis memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber baik berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti, terutama kajian tentang penyelesaian konflik teritorial perairan Tuas antara Malaysia dan Singapura tahun 2018. Beberapa sumber resmi diantaranya www.kln.gov.my, www.mfa.gov.sg dan www.asean.org.
2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya yang akan membantu menjelaskan permasalahan penelitian,

yaitu studi pustaka, teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, studi pustaka dapat berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi mengenai nilai budaya dan norma yang berkembang sesuai dengan obyek penelitian. Dalam mencari data sekunder penulis menggunakan buku fisik, hingga mengakses berbagai website resmi, seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, website resmi yang memiliki fokus terhadap penyelesaian konflik teritorial perairan Tuas antara Malaysia dan Singapura Tahun 2018.

3. Studi dokumentasi, penulis berusaha akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan konflik teritorial di kawasan Asia Tenggara, khususnya antara Malaysia dan Singapura melalui jejak digital, dokumentasi, portal berita dan beberapa situs terpercaya lainnya.

3.4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode studi pustaka yang digunakan peneliti, maka analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Tahap-tahap dari analisis data dari penelitian ini adalah :²⁶

1. Data Reduction

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pertransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan yang tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk

²⁶ Mils and Huberman, "The Research Methodology of Qualitatives", dalam Sugiyono, *Metode Peneliteian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 247-249.

analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat ditarik atau digambarkan dan diverifikasi.

2. *Data Display*

Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau bagan. Melalui penyajian data tersebut, data akan lebih terorganisir dan tersusun, sehingga semakin mudah dipahami. Peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan terhadap data dapat digunakan untuk menyajikan suatu kesimpulan.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Tahap terakhir dalam analisis data ini adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi berdasarkan data-data dan melakukan interpretasi berdasarkan sudut pandang dengan mengkaitkan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, hasil penelitian diuraikan dalam hasil dan pembahasan yaitu tentang penyelesaian konflik teritorial Perairan Tuas antara Malaysia dan Singapura tahun 2018.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, penulis menjabarkan mengenai gambaran umum terkait konflik teritorial di kawasan Asia Tenggara khususnya kasus sengketa antara Malaysia dan Singapura yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, mengenai perkembangan konflik teritorial di kawasan Asia Tenggara, dan bagian kedua mengenai sejarah dan perkembangan konflik dan teritorial Malaysia dan Singapura baik sengketa teritorial perairan maupun daratan, serta konflik Tuas Tahun 2018.

4.1. Perkembangan Konflik Teritorial di Asia Tenggara

Perkembangan konstelasi internasional ternyata tidak bisa dilepaskan dari konflik, baik konflik antar negara ataupun konflik dalam negeri yang juga dikenal dengan perang sipil (*civil war*). Umumnya konflik terjadi akibat sikap agresifitas salah satu negara terhadap negara lain ataupun dapat juga kegagalan pihak-pihak yang bertikai dalam memperoleh solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pada masa lampau permasalahan yang menyangkut sistem sosial-kebudayaan yang paling menonjol adalah tindakan agresifitas dari komunitas-komunitas tertentu yang menyerang komunitas lainnya, yang sekaligus

menjalankan sistem penekanan kebudayaan sesuai dengan tata nilai yang dibawanya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah invasi Kekaisaran Mongol ke Asia Tenggara bagian Utara, aneksasi kerajaan Sriwijaya ke Semenanjung Malaka dan contoh-contoh lainnya.²⁷

Tindakan aneksasi diantara komunitas-komunitas maharaja (kerajaan), mengalami kemajuan yang krusial khususnya menjelang abad ke enam. Tindakan ini dijalankan melalui bentuk kekerasan (*Violence*) dan non-kekerasan (*Non-Violence*). Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud antara lain dijalankan melalaui penyerangan, pendudukan dan intimidasi, sedangkan bentuk-bentuk non-kekerasan dapat berupa akulturasi, kontak perdagangan, perkawinan dan bentuk lainnya. Beberapa contoh kasus invasi di wilayah Asia Tenggara yang menjadi problematika sosial-budaya kawasan Asia Tenggara pada masa lalu adalah invasi Kerajaan Tcen-la pada abad ke enam di wilayah Champa Kamboja, serta Kerajaan Sriwijaya di Indonesia pada abad ketujuh dan beberapa kerajaan lainnya.²⁸

Permasalahan menyangkut perkembangan sosial-budaya negara-negara Asia Tenggara, dapat ditarik benang merah bahwa sejarah yang terkait mampu memberikan berbagai dampak, yang mampu berpengaruh hingga saat ini. Bahkan ekspansi India, Cina dan Arab mampu membawa kebudayaan religius yaitu Budha, Islam dan Hindu yang menjadi panutan hidup mayoritas masyarakat negara-negara Asia Tenggara.²⁹

²⁷ Barry Ole Wilde, 1992, *The Culture for Analysis and Conceptual*, London : Lynne Rienner Publisher, hal 24.

²⁸ <http://berclo.net/page00/00en-sea-history.html>, op,cit.

²⁹ "Islam and Christianly in Southeat Asian 1600-1700", https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/Working_Paper_No_3.pdf, diakses pada tanggal 9 Oktober 2019.

Seiring dengan berjalannya waktu, masa penjajahan kolonialisme bangsa barat marak terjadi sebagai bagian dari pelaksanaan 3 G (*Glory, Gospel dan Gold*) atau kemenangan, penyebaran agama Nasrani dan dalam merealisasikan kemakmuran. Kendati tindakan aneksasi ini membawa dampak yang luar biasa, yang mampu menimbulkan keterpurukan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, namun nilai-nilai kebudayaan yang dibawa oleh kolonialisme dan imperialisme bangsa barat juga mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan sistem kebudayaan negara-negara Asia Tenggara.³⁰

Kemajuan sosial-budaya kawasan Asia Tenggara mengalami kemajuan yang signifikan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh globalisasi mampu memberikan berbagai dampak positif dan negatif, fakta ini sekaligus menjadikan problematika sosial-kebudayaan negara-negara Asia Tenggara menjadi semakin kompleks. bahkan faktor kebudayaan di negara-negara Asia Tenggara mampu menjadi lokomotif, terhadap kemajuan sektor-sektor lainnya.

Berbagai permasalahan sosial-kebudayaan negara-negara Asia Tenggara, mampu memberikan mekanisme perluasan pengaruh (*Spill Over*) bagi sektor-sektor lainnya. Pengaruh degradasi sosio-kultural, masyarakat Asia Tenggara terjadi karena sistem yang terlalu rapuh, sehingga mampu disusupi oleh nilai-nilai kebudayaan barat. Hal ini berbeda dengan sistem sosio-kultural negara-negara Asia Timur yang masih relatif kuat, sehingga mampu menjadi benteng dalam mereduksi dampak negatif asing.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hans Dieter Evers&Rudiger Krofft, 2002, *Urbanisme di Asia Tenggara*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hal, 12.

Lemahnya sistem sosial-kebudayaan negara-negara Asia Tenggara, mampu menimbulkan problematika yang kompleks yang berfokus pada tingkah laku (*attitude*) masyarakat yang semakin permisif terhadap budaya asing. Hal ini mampu berpengaruh secara luas antara lain yaitu :³²

- a. Kebebasan masyarakat yang dinilai terlalu absolut.
- b. Semakin tingginya tingkat ketergantungan terhadap nilai-nilai asing.
- c. Maraknya budaya konsumerisme dan individualistis sekaligus lemahnya nilai-nilai religius (keagamaan).

Sejarah konflik teritorial di kawasan Asia Tenggara ternyata tidak lepas dari faktor historis, dimana agresifitas monarki pada masa lalu membuat munculnya perebutan wilayah seperti yang terjadi pada kerajaan Kamboja, Indonesia ataupun Malaysia. Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, ketika mayoritas beberapa negara di Asia Tenggara berada pada kolonisasi bangsa Eropa ternyata juga meninggalkan beberapa persoalan yang berujung pada terjadinya konflik teritorial diantaranya penentuan garis batas yang belum jelas, penentuan pengelolaan potensi perbatasan hingga adanya klaim secara sepihak antar negara kawasan Asia Tenggara karena wilayah yang belum terkelola secara optimal yang dianggap sebagai *greyzone* atau area yang tidak bertuan.

Konflik teritorial di kawasan Asia Tenggara masih terjadi pada dekade 2000-an. Masalah ini dilatarbelakangi kesalahan penentuan garis batas perairan laut teritorial di kawasan Asia Tenggara. Persoalan sengketa teritorial di kawasan Asia Tenggara juga seringkali melibatkan negara dari wilayah lain, yaitu Cina

³² *Ibid.*

(Tiongkok) yang juga secara agresif berupaya mengembangkan pengaruhnya di wilayah Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Filipina, Malaysia, Indonesia dan sebagian wilayah Thailand.

Adapun sengketa teritorial di kawasan Asia Tenggara yaitu meliputi: Sengketa teritorial Indonesia dan Malaysia, Sengketa Paracell antara Tiongkok dan Vietnam, Sengketa Sullu antara Filipina dan Malaysia serta Sengketa teritorial Malaysia dan Singapura.

4.1.1. Sengketa Teritorial (Indonesia dan Malaysia)

Sengketa bermula di tahun 1967 ketika dalam sebuah pertemuan, kedua negara menyadari bahwa masing-masing memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam wilayah kedua negara. Kedua negara kemudian sepakat bahwa kedua pulau dalam keadaan *status quo*. Pemerintah Indonesia marah ketika belakangan mengetahui bahwa Malaysia membangun tempat peristirahatan di sana. Tahun 1998, sengketa dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia. Kemudian terdapat juga kasus lainnya yaitu kebijakan Pemerintah Malaysia membangun mercusuar di perairan Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat di awal tahun kemarin. Setelah protes dari pemerintah Indonesia, Malaysia akhirnya membongkar *mercusuar* tersebut pada Oktober 2014.³³

³³ “Sengketa Sipadan-Ligitan : Indonesia-Malaysia Sama Kuat”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5742/sengketa-pulau-sipadanligitan-indonesia-dan-malaysia-sama-kuat/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

Kemudian kasus sengketa Indonesia dan Malaysia lainnya adalah sengketa Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia, dua negara serumpun yang bertetangga. Blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makassar itu menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada satu titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Itu baru sebagian kecil, sebab Ambalat memiliki titik tambang tak kurang dari sembilan. Kandungan minyak dan gas di sana disebut dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun dimana menjadi suatu keuntungan besar bagi negara manapun yang menguasai Ambalat. Sejak 1979 Malaysia sudah mengincar Ambalat, ketika negeri itu memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat sebagai titik pengukuran zona ekonomi eksklusif mereka. Dalam peta itu, Ambalat pun diklaim milik Malaysia yang memancing protes dari Indonesia.³⁴

Dari paparan di atas maka sengketa teritorial antara Indonesia dan Malaysia membuktikan bahwa kedua negara ternyata belum sepakat dalam penentuan batas kedaulatan teritorial pada masing-masing negara. Luasnya cakupan wilayah perbatasan dan sikap agresif dari Malaysia menjadikan kasus klaim wilayah perbatasan menjadi seringkali terjadi. Meskipun konflik secara terbuka belum pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia, namun kasus-kasus

³⁴ “Sejarah Panjang Sengketa Indonesia-Malaysia di Ambalat”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

serupa dikhawatirkan akan dapat terjadi mengingat wilayah perbatasan kedua negara, baik di wilayah darat ataupun perairan sangat luas.

4.1.2 Sengketa Paracel (Tiongkok dan Vietnam)

Tiongkok sebenarnya merupakan satu-satunya negara sampai Perang Dunia I yang mengklaim kedaulatan sepenuhnya atas seluruh Kepulauan Spratly, dengan mendasarkan klaimnya atas penemuan pertama. Masalah kedaulatan menjadi masalah yang sensitif antara Prancis, Inggris dan Jepang pada akhir abad ke-19, padahal pada tahun 1876 Tiongkok telah menyatakan bahwa kepulauan Spratly merupakan miliknya. Saling Klaim juga dilakukan beberapa negara lainnya, antara lain; Taiwan mengklaim dan menduduki kembali (1956) kelompok kepulauan ini dengan menempatkan satu garnisiun berkekuatan 600 tentara secara permanen di pulau terbesar, yaitu Itu Aba (Taiping dalam bahasa Tiongkok), serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya; Vietnam Selatan kembali menegaskan haknya atas kepulauan Spratly dan Paracel (1951) dalam konferensi Sanfrancisco. Bahkan setelah unifikasi, Vietnam menegaskan kembali tuntutannya atas kedua kepulauan tersebut pada berbagai kesempatan, dan Vietnam secara teratur mengadakan patroli di sekitar Paracel.³⁵

Sengketa antara Tiongkok dan Vietnam sebenarnya terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Permasalahannya adalah sebelum dekade 1990-an, Tiongkok masih belum memiliki kapasitas perekonomian, pertahanan ataupun politik yang cukup besar sebagai prasyarat negara adikuasa baru. Pada dekade

³⁵ "Paracell Island : South china Morning", <https://www.scmp.com/topics/paracel-islands>, diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

2010-an, sengketa Tiongkok dan Vietnam, terkait dengan wilayah Paracel kembali muncul. Ini membuktikan bahwa konflik teritorial ternyata juga seringkali dipengaruhi oleh faktor politik, yaitu sikap agresif salah satu negara terhadap negara lain yang enggan untuk membicarakan penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur diplomasi.

4.1.3. Sengketa Sulu (Filipina dan Malaysia)

Awal tahun 2013 tepatnya pada tanggal 11 Februari terjadi konflik bersenjata antara pemerintah Malaysia dengan Kesultanan Sulu. Konflik ini berawal dari insiden kedatangan sekelompok orang yang berjumlah sekitar 200 orang dengan bersenjata lengkap ke Tanduo, Datu Lahad, wilayah Sabah. Sekelompok ini menamakan dirinya sebagai "Pasukan Keamanan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara" yang berasal dari wilayah Tawi-Tawi, Filipina.³⁶

Konflik antara pihak Malaysia dengan Kesultanan Sulu ternyata tidak lepas dari motivasi dan dasar dari kedua belah pihak, sehingga perseteruan tahun 2013 dapat terjadi. Konstitusi Malaysia 1967 artikel ke VI bagian 1 dan 92 sebagai pertimbangan politik Malaysia dalam menangani pemberontakan Sulu berkaitan dengan fungsi negara (*The State Chapter*). Dalam butir ini disebutkan bahwa negara (pemerintah) secara serius akan menjaga kedaulatan wilayah, secara *de facto* (secara faktual) dan *de-jure* (secara hukum) dengan mengerahkan segala

³⁶ "Sultanate of Sulu Wants of Sabah Returned to Philippines", <http://www.philstar.com/headlines/2013/02/23/912045/sultanate-sulu-wants-sabah-returned-phl>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

kekuatan dan potensi yang ada. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa warga negara berkontribusi dalam membangun stabilitas keamanan dan pembangunan.³⁷

Sulu merupakan sebuah kesultanan di wilayah Sabah yang telah ada sejak tahun 1450, jauh sebelum Malaysia merdeka. Sejarah Sulu berawal ketika seorang bangsawan Arab, yaitu Syariful Hashem bin Abu Bakar berhasil membangun sebuah kerajaan yang dianggap tidak bertuan dengan menikai warga pribumi bernama Paramisuli. Keberadaan Kesultanan Sulu semakin mendapatkan posisi penting bagi dinamika politik-pemerintahan pada masa itu, ketika kesultanan ini berhasil ikut mendukung stabilitas dalam negeri Brunei Darussalam yang menghadapi pemberontakan. Kesultanan Sulu merupakan wilayah otonom yang mendiami sekitar wilayah Palalawan (Laut Sulu) dan keberadaannya masih menjadi perdebatan dari wilayah ini apakah Sulu masuk dalam kedaulatan Malaysia atau Filipina. Sejak tahun 1450-an, Kesultanan Sulu dijalankan secara turun-temurun oleh keluarga kesultanan Islam, beberapa diantaranya yaitu Sharif ul Hashim yang memimpin dari tahun 1457 hingga 1480 hingga Jamalul Kiram I yang memimpin dari tahun 1884 hingga 1899.³⁸

Paparan di atas dapat diketahui bahwa konflik teritorial antara Malaysia dan Singapura terjadi akibat kesalahan persepsi yang disebabkan faktor historis. Munculnya konflik Sulu membuktikan bahwa selama ini Malaysia dan Filipina tidak cukup memahami wilayah perbatasan perairan kedua negara. Meskipun konflik secara terbuka tidak terjadi, namun penyelesaian secara permanen gagal

³⁷ "Constitution of Malaysia", <http://www1.umn.edu/humanrts/research/malaysia-constitution.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

³⁸ "Historical Timeline of Sulu Royal Sultanate", http://www.seasite.niu.edu/tagalog/Modules/Modules/MuslimMindanao/historical_timeline_of_the_royal.htm, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

untuk dijalankan dan masing-masing pihak, baik Malaysia dan Filipina lebih memilih untuk mempertahankan garis batas masing-masing yang telah menjadi kesepakatan internasional.

4.2. Sejarah dan Perkembangan Konflik Teritorial Singapura dan Malaysia

Singapura menjadi salah satu dari 14 negara bagian Malaysia dari 1963 sampai 1965. Malaysia dibentuk pada 16 September 1963 sebagai sebuah entitas politik baru dari penggabungan Federasi Malaya dengan bekas koloni Inggris Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya periode 144 tahun pemerintahan Inggris di Singapura, yang dimulai dengan pendirian Singapura modern oleh Sir Stamford Raffles pada 1819, namun, penyatuan tersebut tidak stabil karena perselisihan dan perbedaan ideologi antara para pemimpin Negara Bagian Singapura dan pemerintah federal Malaysia. Masalah-masalah semacam itu diakibatkan ketidaksetujuan berkelanjutan terkait ekonomi, keuangan dan politik.³⁹

Sejarah mengenai konflik teritorial antara Malaysia dan Singapura dapat dikategorikan dalam konflik darat, yaitu konflik di dominasi oleh perseteruan dan pertentangan kepemimpinan kedua negara yang ditindaklanjuti dengan penyiagaan aparat keamanan di wilayah perbatasan dan konflik perairan yaitu konflik yang terjadi akibat insiden ataupun pelanggaran teritorial di wilayah perairan antara Malaysia dan Singapura. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 4.1. sebagai berikut :

³⁹ "A History of Malaysia", <http://www.localhistories.org/malaysia.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

Tabel 4.1.**Sejarah Konflik Darat dan Perairan Antara Singapura dan Malaysia**

No.	Periodisasi	Konflik Teritorial Darat	Konflik Teritorial Perairan
1.	1960-1970	3	4
2.	1970-1980	2	na
3.	1980-1990	na	2
4.	1990-2000	1	2
5.	2000-2010	3	2

(NA : not available) / data tidak ditemukan)

Sumber : diolah dari “The Singapore History : Confrontation Ends”, <http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/f950e04d-44d7-47ad-a10c-16dfb0cc9ce3>, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, T. Tortajada, “The Singapore-Malaysia Water Relationship”, The Journal of Hydrological, Singapore, 2011 chapter iii dan “Resolving Southeast Asian Territorial Disputes”, [https://www.files.ethz.ch/isn/109205/IB133-SEARP-AnnaICJ_\(Read-Only\).pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/109205/IB133-SEARP-AnnaICJ_(Read-Only).pdf), diakses pada tanggal 2 Juli 2019.

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa sejak tahun 1960-an hingga 2010-an konflik antara Malaysia dan Singapura ternyata masih terus terjadi. Meskipun jumlahnya cukup fluktuatif pada setiap periodenya, namun kedua negara berhasil mengantisipasi terjadinya konflik secara terbuka. Pada tahun 1960-1970 terjadi tujuh kasus sengketa antara Malaysia dan Singapura, meliputi tiga konflik darat, yaitu pertama, sengketa antara menteri pertahanan kedua negara pada Oktober 1964 antara Menteri Pertahanan kedua negara, kedua, sengketa antara menteri pertahanan kedua negara pada Mei 1966 dan ketiga, kasus insiden batas kedaulatan. Sedangkan pada konflik laut di tahun 1960-1970 terjadi empat kasus sengketa antara Malaysia dan Singapura, yaitu provokasi kapal Malaysia kepada angkatan laut Singapura pada Juni 1965, provokasi kapal Malaysia kepada angkatan laut Singapura pada 8-9 November 1966, insiden *crash ship* di utara

Pulau Tekong pada Februari 1967 dan insiden *crash ship* di sekitar Pulau Ubin pada 8 Agustus 1979.⁴⁰

Pemerintah Malaysia juga konsisten bahwa sesuai dengan hukum internasional, laut teritorial Singapura tetap bisa berubah sekalipun reklamasi dilakukan hampir ke batas terluar teritorialnya. Khaw membalas dengan mengungkap, Malaysia tidak berkonsultasi dengan Singapura saat menerbitkan sebuah peta batas maritim pada 1979. Singapura pun tidak pernah menerima klaim ini karena faktanya, pada 1979 tidak ada reklamasi di Tuas. Jadi, klaim teritorial sepihak Malaysia pada 1979 tidak memperhitungkan reklamasi oleh Singapura. Untuk itulah, pemerintah Malaysia menganggap batas baru Pelabuhan Baru Johor sebenarnya sudah melampaui batas klaim teritorial Malaysia itu sendiri. Kapal-kapal Malaysia telah melewati batas dengan memasuki perairan Singapura.⁴¹

Pada periode 1970-1980 antara Malaysia dan Singapura terlibat konflik darat sebanyak dua kali dan tidak terjadi konflik di wilayah perairan. Konflik ini berupa pelayangan nota protes Malaysia terhadap aktifitas reklamasi pada Mei 1983 dan Desember 1983 pada kasus yang sama. Di tahun 1980-1990 tidak terjadi konflik di darat, namun konflik di perairan kembali terjadi yaitu kasus provokasi dan *crash ship* pada 2 Februari 1988 dan 10 Maret 1988 yang kedua terjadi di sekitar Barat perairan Tuas.

⁴⁰ Diolah dari “The Singapore History : Confrontation Ends”, <http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/f950e04d-44d7-47ad-a10c-16dfb0cc9ce3>, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, T. Tortajada, “The Singapore-Malaysia Water Relationship”, The Journal of Hydrological, Singapore, 2011 chapter iii dan “Resolving Southeast Asian Territorial Disputes”, [https://www.files.ethz.ch/isn/109205/IB133-SEARP-AnnaICJ_\(Read-Only\).pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/109205/IB133-SEARP-AnnaICJ_(Read-Only).pdf), diakses pada tanggal 2 Juli 2019.

⁴¹ *Ibid.*

Pada tahun 1990-2000 terjadi satu kasus konflik darat yaitu adanya nota protes Malaysia kepada Singapura pada 8 Januari 1991. Kemudian pada konflik perairan yaitu provokasi kapal patroli Malaysia di wilayah Singapura pada Juli 1994 dan insiden *crash ship* pada Desember 1999. Pada 2000-2010 terjadi kasus konflik darat berupa nota protes dari tingkat kepala negara dan tingkat menteri masing-masing pada Maret 1994, November 1996 dan Agustus 1999, sedangkan konflik perairan terjadi sebanyak dua kali, yaitu di provokasi angkatan laut Malaysia dan insiden *crash ship* pada Mei 1998 dan November 1998.

4.2.1. Konflik Darat

Konflik darat antara Malaysia dan Singapura terjadi akibat perseteruan antara kedua pemimpin negara, baik pada tingkat kepala negara ataupun pejabat setingkat menteri. Hal yang berperan sebagai pemicu ternyata cukup beragam, diantaranya adanya kritik keras satu negara terhadap negara lainnya ataupun dapat juga akibat gesekan akibat sengketa kewilayah hingga perebutan potensi dan pengelolaan sumber daya. Beberapa kasus yang terjadi diantaranya :

1. Pada tahun 1960-1970 terjadi tujuh kasus sengketa antara Singapura dan Malaysia, meliputi tiga konflik darat, yaitu pertama, sengketa antara menteri pertahanan kedua negara pada Oktober 1964 antara Menteri Pertahanan Singapura Ghoh Keng Swe dengan Menteri Pertahanan Abdul Razak Hussein akibat adanya isu infiltrasi ideologi, kedua, sengketa antara menteri pertahanan kedua negara pada Mei 1966 antara Menteri Pertahanan Singapura Ghoh Keng Swe dengan Menteri Pertahanan Abdul

Razak Hussein akibat adanya aktifitas militer Singapura yang mendekati ke wilayah Johor Selatan dan ketiga, kasus insiden flight pas pesawat militer Malaysia ke Barat Laut Singapura yang berujung pada munculnya sikap protes dari pihak Singapura. Meskipun terjadi beberapa konflik di wilayah darat, namun antara Malaysia dan Singapura tidak mengalami konflik secara terbuka.

2. Pada tahun 1970-1980 antara Singapura dan Malaysia terlibat konflik darat sebanyak dua kali. Konflik ini berupa pelayangan nota protes Malaysia terhadap aktifitas reklamasi pada Mei 1983, ketika pemerintah Singapura memperluas garis pantai di sekitar Pulau Ubin dan Desember 1983 pada kasus yang sama atas Pantai Ubin dan wilayah Payau Singapura Barat yang dianggap mengganggu batas kedaulatan Malaysia pada masa itu.
3. Pada tahun 1980-1990 terjadi tidak terjadi konflik di darat.
4. Pada tahun 1990-2000 terjadi satu kasus konflik darat yaitu adanya nota protes Malaysia kepada Singapura pada 8 Januari 1991. Persoalan ini terjadi ketika Perdana Menteri Mahathir Mohammad menyatakan sikap protesnya terhadap pembangunan resort di wilayah Sembawang yang menyebabkan terganggunya pelayaran dan aktifitas nelayan pada itu.
5. Pada tahun 2000-2010 terjadi kasus konflik darat berupa nota protes dari tingkat kepala negara dan tingkat menteri masing-masing pada 20 Maret 1994, awal November 1996 dan 30 Agustus 1999. Kasus ini ternyata memiliki hubungan dengan konflik-konflik sebelumnya yaitu adanya kebijakan reklamasi yang dijalankan oleh Singapura dan kemudian

mendorong pemerintah Malaysia untuk bereaksi atas persoalan ini dan berujung pada benturan kepentingan kedua negara, meskipun tidak terjadi konflik secara terbuka.

4.2.2. Konflik Perairan

Sejarah konflik perairan antara Malaysia dan Singapura sebenarnya telah terjadi pada awal tahun 1960-an, ketika kedua negara memperebutkan kontrol atas Selat Melaka, bahkan persoalan ini kemudian melibatkan pihak Indonesia. Di tahun yang berbeda, sebagai contoh tahun 1988 antara Malaysia dan Singapura juga seringkali menghadapi *crash ship* yaitu ketegangan akibat patroli maritim kedua negara. Faktor sempitnya geografis dan adanya primordialisme melatarbelakangi terjadinya konflik perairan tersebut.⁴²

1. Pada periode tahun 1960-1970 terjadi empat kasus sengketa antara Malaysia dan Singapura, yaitu provokasi kapal Malaysia kepada angkatan laut Singapura pada Juni 1965 akibat kedua belah pihak sama-sama mengklaim tidak melanggar garis batas kedaulatan perairan, namun secara faktanya tentunya ada salah satu kapal yang masuk ke wilayah perairan Malaysia ataupun Singapura, provokasi kapal Malaysia kepada angkatan laut Singapura pada 8-9 November 1966, insiden *crash ship* di utara Pulau Tekong pada Februari 1967 dan insiden *crash ship* di sekitar Pulau Ubin pada 8 Agustus 1979.

⁴² *Ibid.*

2. Pada tahun 1970-1980 antara Malaysia dan Singapura tidak terjadi konflik di wilayah perairan.
3. Pada tahun 1980-1990 terjadi tidak terjadi konflik di darat, namun konflik di perairan kembali terjadi yaitu kasus provokasi dan *crash ship* pada 2 Februari 1988 dan 10 Maret 1988 yang kedua terjadi di sekitar Barat perairan Tuas. Seperti pada periode-periode sebelumnya, dimana tindakan kapal militer salah satu negara kemudian direspon oleh negara lainnya karena dianggap sebagai tindakan provokasi pelanggaran batas kedaulatan wilayah Singapura ataupun Malaysia.
4. Pada tahun 1990-2000 terjadi konflik perairan yaitu provokasi kapal patroli Malaysia di wilayah Singapura pada Juli 1994 dan insiden *crash ship* pada Desember 1999. Pada periode ini kasus konflik perairan juga terjadi akibat pihak Malaysia menjalankan perlindungan terhadap kapal niaga dan nelayan yang ternyata masuk ke wilayah perairan Singapura dan kemudian kapal militer ini dihalau oleh pihak Singapura yang berujung pada benturan jalur kapal militer atau *crash ship*.
5. Pada tahun 2000-2010 terjadi kasus konflik perairan terjadi sebanyak dua kali, yaitu di provokasi angkatan laut Malaysia dan insiden *crash ship* pada Mei 1998 dan November 1998. Seperti halnya pada periode-periode sebelumnya *crash ship* terjadi karena pelanggaran lintas batas kedaulatan dan tentunya masalah ini tidak lepas dari sempitnya batas laut kedua negara yang terhampar dari wilayah Tuas, Marai Lim Chu Kang hingga Pulau Ubin dan Pulau Tekong.

Sejarah konflik teritorial di wilayah perairan antara Malaysia dan Singapura telah terjadi pada tahun 1960-an dimana tercapainya pengelolaan bersama wilayah perbatasan tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Singapura) di sekitar Selat Malaka. Pada masa ini ketiga negara sepakat untuk menghilangkan pandangan nasional dan lebih memilih mengelola wilayah perairan Selat Malaka yang menjadikan wilayah perairan ini sebagai jalur pelayaran termaju di dunia pada masa itu.⁴³

Pada tahun 1979 hingga 1980 setelah Malaysia, Indonesia dan Singapura berhasil mengelola secara bersama-sama antara Malaysia dan Singapura mengalami de-eskalasi konflik.⁴⁴ Dalam perkembangannya Menteri Perhubungan Singapura Khaw Boon Wan menjelaskan wilayah udara yang didelegasikan ke manajemen Singapura berdasarkan perjanjian dengan negara-negara di kawasan, termasuk Malaysia, pada 1973. Khaw Boon Wan melanjutkan, mengatakan prosedur penerbangan baru atau *Instrument Landing System* (ILS), pilot memungkinkan mendekati bandara dan landasan pacu dengan cara lebih aman dan tepat. Menindaklanjuti hal ini pemerintah Singapura juga menerbitkan pernyataan resmi berisi protes keras kepada Kuala Lumpur terkait masalah berbeda, yakni rencana Malaysia untuk memperpanjang batas pelabuhan Johor Baru.⁴⁵

Pada tahun 1990 Malaysia dan Singapura menerima rekomendasi ICJ (*International Court Justice*). Secara legal formal, dengan ketentuan ini Malaysia

⁴³ Jean Nicole, "Managing Territorial Disputes in Southeast Asian : Is There More Than South China Sea Conflict", The Journal of Current of Southeast Asian Affairs, Institut of Global Area Studies Publishing, Hamburg, 2017, hal.46.

⁴⁴ "Singapore Relations With Malaysia, http://factsanddetails.com/southeast-asia/Singapore/sub5_7c/entry-3769.html, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16:30

⁴⁵ *Ibid.*

dan Singapura dapat memiliki seperangkat aturan tentang status wilayah teritorial, namun persoalan muncul ketika secara teknis sempitnya wilayah perbatasan perairan kedua negara justru akan menimbulkan persoalan baru seperti pada konflik Tuas.⁴⁶

4.3. Konflik Tuas Tahun 2018

Konflik Tuas merupakan persoalan dari rangkaian konflik teritorial antara Malaysia dan Singapura yang telah berlangsung sejak lama yang kemudian terus bertransformasi sampai dengan pecahnya konflik ini pada tahun 2018. Hubungan Malaysia dan Singapura memanas di tahun 2018. Awalnya, Singapura dianggap sewenang-wenang dengan menerapkan aturan baru bagi penerbangan di wilayah udara Malaysia yakni Bandara Seletar. Sebaliknya, Singapura menyebut kapal-kapal Malaysia melanggar wilayah perairannya. Konflik Tuas berawal pada akhir 2018 ketika Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke mengatakan Malaysia akan mengambil lagi pengelolaan wilayah udara di Johor Selatan, tugas yang sudah lama diserahkan ke Singapura. Alasannya mereka keberatan dengan prosedur penerbangan baru yang diusulkan Singapura di Bandara Seletar. Ada perubahan jalur penerbangan bagi pilot yang mendarat Seletar dengan alasan pola

⁴⁶ "Case Between Malaysia-Singapore Disputes", https://opil.ouplaw.com/browse;jsessionid=0ED11748A24135D177B435EB651BAC91?page=3&pageSize=10&sb_0=ae60e488-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sb_1=ae60ef3c-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sb_2=ae5ddc85-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sort=title, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16:30

yang lama akan menghambat pembangunan di sekitar kawasan industri Pasir Gudang.⁴⁷

Konflik Tuas tahun 2018 secara runtut dapat dijelaskan pada garis waktu (*milestone*) sebagai berikut :⁴⁸

1. Pada 25 Oktober 2018 pemerintah Malaysia melalui Jaksa Agung (*Malaysian Federal Government Gazette*) menyatakan bahwa Singapura telah melakukan tindakan provokasi yaitu merubah garis batas di sekitar perairan Tuas.
2. Pada 26 Oktober 2018 pemerintah singapura melalui Kementerian Perhubungan (*Singapore Transportation of Ministry*) menyatakan bahwa pemerintah Singapura tidak merubah batas wilayah wilayah, namun mempertegas bahwa wilayah Tuas merupakan bagian dari kedaulatan Singapura.
3. Pada 29 Oktober 2018 pemerintah Malaysia dan Singapura secara konsisten masih bersikukuh bahwa wilayah Tuas tetap menjadi wilayah pada masing-masing negara sesuai yang dinyatakan oleh menteri perhubungan kedua negara.
4. Pada 30 Oktober 2018 hingga 15 November 2018 pemerintah Malaysia dan Singapura menganggap bahwa konflik Tuas tetap menjadi bola liar karena masing-masing pihak Malaysia dan Singapura menganggap Tuas

⁴⁷ “Berikut Kronologi Konflik Perbatasan antara Malaysia dan Singapura”, <https://www.inews.id/news/internasional/berikut-kronologi-konflik-perbatasan-antara-malaysia-dan-singapura/387057>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

⁴⁸ “Malaysia, Singapura Konflik Laut Tentang Apa”, <https://dunia.tempo.co/read/1152628/singapura-malaysia-konflik-perbatasan-laut-soal-apa>, diakses pada tanggal 18 September 2019.

sebagai wilayah kedaulatannya dan ditindaklanjuti dengan penyiagaan aparat militer (Angkatan Laut) dan kepolisian maritim di wilayah Tuas.

5. Pada 15 November 2018 Sampai 12 Desember 2018 pemerintah Malaysia dan Singapura menyatakan konflik Tuas akan dikonsultasikan dalam forum UNCLOS.
6. Pada 28 Desember pemerintah Malaysia dan Singapura menyatakan konflik Tuas telah selesai dengan pendekatan penentuan garis batas UNCLOS yang dilegitimasi oleh perdana menteri Singapura Lee Hisen Loong dan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohammad.

Paparan di atas dapat dipahami bahwa konflik teritorial, baik di wilayah perairan atau daratan ternyata tidak lepas dari beberapa faktor, diantaranya kondisi geografis, sikap kepemimpinan dan adanya pemicu. Meskipun demikian antara Malaysia dan Singapura tidak mengalami konflik secara terbuka. Kedua negara meskipun menghadapi ketegangan, namun sadar keberadaannya sebagai bangsa serumpun yang berupaya mencari bentuk penyelesaian konflik secara damai.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Konflik Tuas tahun 2018 telah membuat ketegangan antara Malaysia dan Singapura pada level kepemimpinan hingga instansi-instansi di bawahnya pada level setingkat menteri. Persoalan ini berdampak pada hubungan ekonomi, perniagaan perairan hingga terhentinya beberapa proyek investasi kerjasama pengembangan maritim yang sebelumnya telah direncanakan bersama.

Penyelesaian Konflik Tuas tahun 2018 antara Malaysia dan Singapura dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang cukup singkat. Pencapaian ini sekaligus membuka babak baru bagi kebijakan penyelesaian konflik, bukan hanya bagi Malaysia dan Singapura, namun juga negara-negara kawasan Asia Tenggara yang juga menghadapi berbagai persoalan yang sama tentang konflik teritorial. Efektifnya penyelesaian Konflik Tuas tidak lepas dari berbagai kebijakan dalam ranah bilateral yang mengarah ke kolaborasi yaitu inisiatif dari pemimpin Malaysia dan Singapura dan adanya inisiatif dari aparaturnya di bawahnya, meliputi militer, keamanan hingga masyarakat, serta adanya inisiatif dan masukan dari ASEAN yang berhasil menawarkan kerangka perdamaian.

Penyelesaian konflik Tuas tahun 2018 tidak lepas dari inisiatif Malaysia dan Singapura dalam mengurangi provokasi pada kedua negara. Pada kedua negara, upaya penyelesaian konflik teritorial antara Malaysia dan Singapura diwujudkan dengan membangun negosiasi baik secara regional, serta menjalankan negosiasi atas rekomendasi ASEAN dan penyelarasan Hukum Laut Internasional (UNCLOS) yang pada akhirnya dapat membawa penyelesaian atas Konflik Tuas tahun 2018. ASEAN selama ini merupakan organisasi regional yang meninggalkan *coercion* (paksaan) dan intervensi yang berlebihan, namun dengan ini justru negara-negara dapat menerima berbagai penyelesaian dan rekomendasi dari ASEAN karena organisasi ini terbebas dari politik praktis.

Sengketa perairan teritorial antara Malaysia dan Singapura diselesaikan dengan cepat karena kedua negara ingin memperbaiki kondisi aspek perdagangan, pelayaran, kedaulatan, ekonomi dan pariwisata yang pada saat itu cukup terganggu akibat konflik sengketa perairan Tuas tahun 2018. Dengan berakhirnya konflik sengketa tersebut, hubungan bilateral antara Malaysia dan Singapura yang terjalin menjadi semakin membaik serta saling menguatkan kerja sama bilateral kedua negara di masa yang akan datang.

6.2. Saran

Melalui penelitian penulis dapat memberikan saran yang dapat dimanfaatkan, sebagai berikut:

1. Kepada para akademisi diperlukan penelitian lebih lanjut tentang tentang perbandingan sengketa perairan teritorial, seperti halnya konflik Tuas dengan konflik serupa di negara ataupun wilayah lainnya. Dengan demikian nantinya dapat diperoleh tentang pemahaman bagaimana penyelesaian konflik dapat tercapai.
2. Penyelesaian konflik Tuas terjadi ketika hubungan antara negara-negara ASEAN justru berkembang dengan progresif. Perkembangan perekonomian dan politik ASEAN menurut World Bank menduduki peringkat kedua setelah Uni Eropa dan konsorsium Asia Timur. Munculnya konflik Tuas kemudian menjadi perhatian penting bagi Malaysia dan Singapura untuk dengan segera membangun langkah-langkah penyelesaian konflik dalam lingkup bilateral serta menerima berbagai fasilitasi/rekomendasi dari ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azwar, Saefudin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Clutterbuck, Richard, 1997, *Conflict and Violence of Singapore and Malaysia*, Singaporem : Graham Bras Publishing.
- Coleman, Petter T. and Eric Colton Marcus, 2000, *The Handbook of Conflict Resolution : Theory and Practice*, London : Willey and Soon Publisher.
- Dieter, Hans Evers&Rudiger Krofft, 2002, *Urbanisme di Asia Tenggara*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Freeman, Chas W. 1994.*The Diplomat Dictionary*, Washington DC : United States of Institute of Peace Press.
- Frinch, Brian dan kusnandar (ed), 2001, *30 Minutes Negotiate : Deal Memenangkan Negosiasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miall, Hugh, 2007, *Emergent Conflict and Peaceful Change*, London and New York : Palgraff Mc Millan.
- Raymond C. Kelly, 2000.*Warless Societies and the Origins of War*, Ann Abror : University of Michigan, Press.
- Sugiyono, 2010, *Metode Peneliteiten Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Wilde, Barry Ole, 1992,*The Culture for Analysis and Conceptual*, London : Lynne Rienner Publisher.

Surat Kabar :

- “*Singapura dan Malaysia Kedepankan dialogis Selesaikan Konflik Tuas*”, Kompas, 29 Oktober 2018.

Jurnal dan Laporan :

- Daniel W Boon Chua, "*Why It Still Matters of Singapore*", RSIS Commentary Journal, S Rajaratnam International School Studies, No.054.Singapore, 2015.
- Hassan Wirayudha, "*Kasus Sipadan-Ligitan : Masalah Pengisian Konsep Negara Dalam Penyelesaian Konflik Sipadan dan Ligitan*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 33, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Julius Adavise Adinoyi, "*Territoriality and Territorial Proximity As The Causes International Conflict*", The Journal of International Affairs and Global Strategy, Vol.36, Routledge Publishing, London and New York, 2016.
- LW Sarys, "*The Effect of Provocation on Foreign Policy Response : A Test of a Matching Hypothesi*", The Journal of International Interactions, Vol.18, Routledge Publishing, London and New York, 1995.
- M Okano, "*How To Deal With Border Issue : A Diplomat Practioner Perspective*" Journal of Eurasia Border Review, Hokudai Institute, Tokyo, 2015.
- Nicole, Jean, "*Managing Territorial Disputes in Southeast Asian : Is There More Than South China Sea Conflict*", The Journal of Curent of Southeast Asian Affairs, Instiotue of Global Area Studies Publishing, Hamburg, 2017.
- Rusdi Omar, "*An Analysis Underlying Factor That Affected Malaysia-Singapore Relations During The Mahathir Era : Discord and Continuily*", *Philosophy Doctoreal Programe Journal*, University of Adelaide, Adelaide, 2014.
- Skripsi, A. Arifah, "*Kepentingan China Dalam Pengklaiman Kepulauan Spratly dan Paracel Terhadap Konflik Laut China Selatan*", Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Bandung, 2018.
- Skripsi, B. Syaiful, "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Batu Puteh Antara Malaysia dan Singapura Tahun 2008*", Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Padang, 2011.
- Tortajada, T. "*The Singapore-Malaysia Water Relationship*", The Journal of Hodrological, Singapore, 2011.

Wertheim, E. *“Negotiation and Resolving Conflict : An Overview”*, the Journal of Business Administration, Boston, 2011.

Internet (web site) :

“A History of Malaysia”, <http://www.localhistories.org/malaysia.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“Berikut Kronologi Konflik Perbatasan antara Malaysia dan Singapura”, <https://www.inews.id/news/internasional/berikut-kronologi-konflik-perbatasan-antara-malaysia-dan-singapura/387057>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“Case Between Malaysia-Singapore Disputes”, https://opil.ouplaw.com/browse;jsessionid=0ED11748A24135D177B435EB651BAC91?page=3&pageSize=10&sb_0=ae60e488-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sb_1=ae60ef3c-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sb_2=ae5ddc85-6d71-1014-90bf-c1927c3ed365&sort=title, diakses pada tanggal 22 April 2019 pukul 16:30.

“Commentary of Singapura-Malaysian Border Disputes : Beware of Grey Zone Conflict”, <https://defensepoliticsasia.com/commentary-of-malaysia-singapore-border-dispute-beware-of-grey-zone-conflicts/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2019.

“Constitution of Malaysia”, <http://www1.umn.edu/humanrts/research/malaysia-constitution.pdf>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“Hishamudin Tell Putrajaya to Forget Verbal War With Singapore”, <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2018/12/12/hishammuddin-tells-putrajaya-to-forget-verbal-war-with-singapore-calls-for/1702530>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“Historical Timeline of Sulu Royal Sultanate”, http://www.seasite.niu.edu/tagalog/Modules/Modules/MuslimMindanao/historical_timeline_of_the_royal.htm, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“Hubungan Singapura-Malaysia Memanas Akibat Batas Pelabuhan”, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4333709/hubungan-malaysia-dan-singapura-memanas-akibat-batas-pelabuhan>, diakses pada tanggal 22 April 2019.

“*Kingdom of Southeast Asian*”, <http://berclo.net/page00/00en-sea-history.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“*Law of the Sea Mechanism : Examining of UNCLOS Maritime Zone*”, <https://www.maritime-executive.com/article/Law-of-the-Sea-Mechanisms-Examining-UNCLOS-Maritime-Zones-2014-12-01>, diakses pada tanggal 27 Juni 2019.

“*Malaysia : Fact, History and Geography*”, <https://www.britannica.com/place/Malaysia>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

“*Malaysia-Singapura akhiri sengketa Ruang Udara dan Perairan* “ , <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190408111543-106-384206/malaysia-singapura-akhiri-sengketa-ruang-udara-dan-perairan>, diakses pada tanggal 22 November 2019.

“*Malaysia-Singapore Agree on 5 Point Measures to Address Maritime Issue*”, <https://www.nst.com.my/news/nation/2019/03/469137/malaysia-singapore-agree-5-point-measures-address-maritime-issues>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“*Malaysian-Singapore Conflict of Territorial Waters*”, <https://safety4sea.com/malaysia-and-singapore-conflict-on-territorial-waters/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“*Malaysia-Singapore Relations refers to the bilateral foreign relations between the two countries*”, https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia%E2%80%93Singapore_relations, diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

“*Maritime Disputes : Timeline of Action Between Singapore and Malaysia From 1979*”, <https://www.todayonline.com/singapore/maritime-dispute-timeline-actions-between-singapore-and-malaysia-1979>, diakses pada tanggal 2 April 2019.

“*Oral Reply By Minister For Defense Dr E Eng*”, https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2019/January/15jan19_pq, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“*Paracell Island : South china Morning*”, <https://www.scmp.com/topics/paracell-islands>, diakses pada tanggal 29 Juni 2019.

- “Regulation on Navigation on Foreign Vessel”*,
<https://brill.com/view/book/edcoll/9789004396272/BP000011.xml>,
diakses pada tanggal 25 April 2019.
- “Sejarah Panjang Sengketa Indonesia-Malaysia di Ambalat”*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat>, diakses
pada tanggal 28 Juni 2019.
- “Sengketa Maritim Malaysia : Singapura Saling Tuduh Mencaplok Area Pelabuhan”*,
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46468189>, diakses
pada tanggal 28 Juni 2019.
- “Sengketa Sipadan-Ligitan : Indonesia-Malaysia Sama Kuat”*,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5742/sengketa-pulau-sipadanligitan-indonesia-dan-malaysia-sama-kuat/>, diakses pada tanggal
28 Juni 2019.
- “Sengketa Wilayah Singapura dan Malaysia Akan Dibahas Pekan Depan”*,
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190102152600-106-357975/sengketa-wilayah-singapura-dan-malaysia-dibahas-pekan-depan>,
diakses pada tanggal 22 April 2019.
- “Singapore : Fact, History and Geography”*,
<https://www.britannica.com/place/Singapore>, diakses pada tanggal 20
Maret 2019.
- “Singapore, Malaysian Maritime Disputes”*,
<https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-malaysia-maritime-dispute-port-limits-timeline-11006762>, diakses pada tanggal 22
April 2019.
- “Singapore Relations With Malaysia”*, http://factsanddetails.com/southeast-asia/Singapore/sub5_7c/entry-3769.html, diakses pada tanggal 22 April
2019.
- “Singapore : Malaysian Maritime Disputes 2 Vessels Malaysian Still in singapore Waters”*,
<https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/2-malaysia-vessels-still-in-singapore-waters-maritime-dispute-11108242>, diakses
pada tanggal 15 Maret 2019.
- “Singapore Relations With Malaysia”*, http://factsanddetails.com/southeast-asia/Singapore/sub5_7c/entry-3769.html, diakses pada tanggal 22 April
2019.

“Singapore Separates Malaysia Become Independent”,
<http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/dc1efe7a-8159-40b2-9244-cdb078755013>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

“Sultanate of Sulu Wants of Sabah Returned to Philippines”,
<http://www.philstar.com/headlines/2013/02/23/912045/sultanate-sulu-wants-sabah-returned-phl>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

“The Malaysia-Singapore Border Spat A Chronology”,
<https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/14/the-malaysia-singapore-maritime-border-spat-chronology/>, diakses pada tanggal 2 April 2019.

“Tuas” , <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tuas> , diakses pada tanggal 24 November 2019.

“United Nations Convention of the Law The Sea”,
<http://www.imo.org/en/OurWork/Legal/Pages/UnitedNationsConventionOnTheLawOfTheSea.aspx>, diakses pada tanggal 27 Juni 2019.